



Fani Ratny Pasaribu¹
 Puryanto²
 Nursaadah Khudri³
 Yumi Ariyati⁴
 Erika Sabelau⁵

PENYUSUNAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MELAYANI MASYARAKAT DI NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

Abstrak

Penelitian ini menganalisis proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Nagari Batu Bulek, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang diupayakan pemerintah nagari. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap tujuh informan kunci melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Batu Bulek melaksanakan fungsi manajemen sesuai dengan teori manajemen yang umum, mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Dalam perencanaan, kebutuhan dan prioritas pembangunan dibahas dalam Musyawarah Nagari dan Musrenbang Nagari. Meskipun terdapat penglibatan masyarakat, pelaksanaan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran. Pada fungsi pengorganisasian, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dilakukan secara jelas, tetapi hambatan seperti jarak domisili dan pemahaman administrasi yang kurang mengganggu efektivitas. Penggerakan dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka dan kolaborasi, meskipun adanya beban pekerjaan tinggi dapat menunda pelayanan. Fungsi pengendalian menerapkan transparansi dan partisipasi dengan pengawasan berjenjang dan penggunaan aplikasi SisKeuDes. Kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, jarak akses masyarakat, dan prosedur administrasi, ditangani melalui koordinasi lintas pihak, penambahan staf, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Kesimpulannya, meskipun terdapat upaya yang baik dalam pengelolaan pemerintahan nagari, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya dan efisiensi kerja agar pembangunan dan pelayanan publik dapat dioptimalkan.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan, Fungsi Manajemen

Abstract

This study analyzes the development planning process and financial management in Nagari Batu Bulek, as well as identifies the obstacles and solutions pursued by the nagari government. The research uses a qualitative descriptive method with purposive sampling involving seven key informants through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the Nagari Batu Bulek government implements management functions in accordance with general management theory, including planning, organizing, actuating, and controlling. In the planning stage, development needs and priorities are discussed in the Nagari Meeting and the Nagari Development Planning Forum. Although community involvement is present, implementation is still hindered by budget limitations. In the organizing function, the formation of the Activity Implementation Team (TPK) is carried out clearly, but barriers such as distant residences and limited administrative understanding affect effectiveness. Actuating is carried out through open communication and collaboration, although heavy workloads may delay services. The controlling function applies transparency and participation through tiered supervision and the use of the SisKeuDes application. Constraints faced, such as limited

^{1,2,3,4} Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

⁵ Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

Email: faniratnypasaribu@unespadang.ac.id, puryantoyan@yahoo.com, nursaadahkhudri@gmail.com, yumiariyati27@gmail.com, erikasabelau98@gmail.com

budgets, community access distances, and administrative procedures, are addressed through cross-sector coordination, additional staff, and strengthened accountability and transparency. In conclusion, although efforts toward improving nagari governance are evident, enhanced resource capacity and work efficiency are still needed to optimize development and public services.

Keywords: Development Planning, Financial Management, Management Functions

PENDAHULUAN

Penyusunan perencanaan pembangunan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Meskipun regulasi tersebut berlaku secara nasional, tantangan terbesar justru berada pada proses implementasi di tingkat daerah, terutama pada level pemerintahan paling bawah seperti nagari, yang memiliki peran langsung dalam menentukan arah pembangunan di lingkup masyarakat terkecil. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam bentuk keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah sehingga perencanaan tersebut dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di kabupaten dan kota, provinsi dan nasional. Perencanaan pembangunan terpadu dimaksudkan untuk pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Tanah Datar, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, juga mengadopsi sistem pemerintahan nagari ini. Dengan jumlah nagari yang tersebar di berbagai kecamatan, Kabupaten Tanah Datar menghadapi tantangan dalam hal keseragaman pembangunan antar wilayah, distribusi anggaran, dan kemampuan masing-masing nagari dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama satu dekade terakhir. Terjadi beberapa kali defisit anggaran, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar 192,73 miliar rupiah.³ Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam manajemen keuangan daerah yang secara tidak langsung juga berdampak pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan.

Tabel 1.1 Data Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar

No.	Tahun	Pendapatan Daerah (dalam Miliar)	Belanja Daerah (dalam Miliar)	Defisit Anggaran (dalam Miliar)
1	2015	1.151,90	1.106,20	-45,70
2	2016	1.188,76	1.249,50	60,74
3	2017	1.224,56	1.218,83	-5,73
4	2018	1.230,34	1.238,10	7,76
5	2019	1.339,71	1.350,36	10,65
6	2020	1.194,82	1.185,20	-9,62
7	2021	1.251,06	1.207,54	-43,52
8	2022	1.173,57	1.186,93	13,36
9	2023	1.255,73	1.263,88	8,15
10	2024	1.157,98	1.350,71	192,73

(Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id>, 2025)

Tabel di atas menunjukkan data pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Datar selama sepuluh tahun terakhir. Data ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam pengelolaan anggaran, yang dalam beberapa tahun menunjukkan surplus, namun di tahun-tahun lainnya mengalami defisit. Ketidakstabilan ini menandakan adanya permasalahan struktural dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan belanja daerah. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa upaya perbaikan sistemik, maka akan berdampak pada ketidakmerataan pembangunan, ketidakefisienan penggunaan anggaran, serta lemahnya daya saing daerah. Terlebih lagi, ketika

ditelaah lebih lanjut pada skala kecamatan dan nagari, disparitas tersebut menjadi semakin nyata.

Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar, yang dibentuk melalui pemekaran dari Kecamatan Lintau Buo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2003. Kecamatan ini terdiri dari lima nagari, yaitu Nagari Balai Tangah, Nagari Batu Bulek, Nagari Lubuk Jantan, Nagari Tanjung Bonai, dan Nagari Tepi Selo. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam bentuk keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan terpadu dimaksudkan untuk pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan di Nagari Batu juga Bulek belum sepenuhnya menyentuh sektor-sektor prioritas, seperti pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat masih terbatas, sehingga menimbulkan persepsi bahwa penggunaan dana nagari belum optimal. Jika hal ini terus berlangsung, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah nagari.

Pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat dan pengelolaan keuangan yang akuntabel di tingkat nagari tidak hanya berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks otonomi daerah, kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan di tingkat nagari, termasuk melalui pelatihan bagi perangkat nagari, pendampingan teknis, serta penguatan sistem pelaporan dan evaluasi program. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan menggali secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Nagari Batu Bulek, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun yang menjadi hambatan. Fokus analisis dalam penelitian ini akan diarahkan pada bagaimana penerapan empat fungsi manajemen, perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Nagari Batu Bulek dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan nagari. Pendekatan ini penting karena empat fungsi manajemen tersebut menjadi landasan utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas tata kelola manajerial pemerintahan nagari serta menjadi bahan evaluasi dan dasar rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Melayani Masyarakat di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2009), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alami, serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat, observasi lapangan, studi pustaka, dan jurnal online. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk membahas dan menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam melayani masyarakat di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Penyusunan perencanaan pembangunan di Nagari merupakan tahapan strategis yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas program kerja pemerintah nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan ini umumnya dilakukan melalui musyawarah nagari (Musnag) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat,

mulai dari pemerintah nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, diharapkan setiap program pembangunan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan keuangan nagari memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi perencanaan pembangunan. Pengelolaan keuangan nagari harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dana nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diharapkan dapat dikelola secara efektif untuk mendanai program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik. Kemudian, berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti mengenai penelitian penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Nagari Batu Bulek yaitu menggunakan teori manajemen oleh George R. Terry di mana menurut Terry, terdapat 4 fungsi dasar manajemen yaitu Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan/Pelaksanaan (actuating), dan Pengawasan (controlling).

1. Perencanaan (Planning)

Menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-umsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁶⁰ Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan informasi dari perangkat pemerintah nagari Batu Bulek mengenai proses perencanaan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam melayani masyarakat di Nagari Batu Bulek melalui studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mengetahui dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian mengenai penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam melayani masyarakat di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan:

“Perencanaan pembangunan di Nagari Batu Bulek itu mulai dari, karena batu bulek ada 9 jorong, dan perencanaannya memang setiap jorong tu harus melaksanakan musyawarah, contoh jorong Pato butuhnya aula serbaguna, nanti dia akan membuat semacam berita acara dan dikumpulkan ke nagari unuk pembangunan aula serbaguna, nanti jorong lain juga contohnya jorong lain ingin jalan usaha tani ingin di bangun, jorong lain ingin ini, nanti akan dirangkum semuanya, dan kemudian itu gunanya musyawarah nagari, nanti akan dimusyawarahkan usulan dari tiap jorong tu, mana yang paling prioritas yang istilahnya mana yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini, kalau memang seluruhnya itu dibutuhkan, tapi ada yang lebih dibutuhkan itulah yang akan dilaksanakan pembangunan, kalau yang masih hanya sekedar dibutuhkan tapi tidak menganggu kegiatan perekonomian masyarakat, mungkin itu bisa ditunda atau di prioritaskan ke nomor sekian, tapi untuk yang lebih urgent sifatnya dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diprioritaskan nomor 1, itu akan dilaksanakan, itu berdasarkan keputusan bersama nanti di musyawarah nagari, bukan keputusan pak Wali. Hanya itu memang bersama masyarakat. Baik itu fisik maupun non fisiknya, kan ada kegiatan di nagari semacam kegiatan pemberdayaan namanya, pelatihan untuk masyarakat, kegiatan sosialisasi pada masyarakat, itu juga dalam musyawarah, mana yang lebih dibutuhkan, contoh masyarakat ada butuh sosialisasi tentang narkoba, karena narkoba merajalela, maka dibutuhkan disitu sosialisasi tentang bahaya narkoba, mungkin karena sedang marak di masyarakat atau urgent sifatnya, mungkin itu yang akan diprioritaskan untuk kegiatan yang nonfisik. Jadi tergantung apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Dan setelah diputuskan akan dirangkum ke dalam RKP Nagari yang akan dilaksanakan kalau yang untuk tahun 2026 itu perencanaannya di tahun sekarang, itu sudah dilaksanakan kemarin musyawarah nagari tahun 2025 untuk angaran tahun 2026.”⁶¹

Pernyataan di atas diperkuat lagi oleh Bapak Al Ikhlas S. Kom selaku Kaur Perencanaan Nagari Batu Bulek terkait dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan:

“Untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran di nagari batu bulek,

direncanakan dari awal dimulai dengan musyawarah di jorong karna nagari batu bulek terdiri dari 9 jorong, jadi pak Wali mengintruksikan pada semua jorong untuk melakukan rapat jorong untuk menentukan apa yang akan diusulkan dari tiap jorong itu nantinya dengan mempertimbangkan segala macam potensi yang ada di nagari batu bulek, segala sumber daya yang ada, potensi yang ada dihimpun semuanya, nanti dari tiap jorong akan diusulkan beberapa kegiatan yang akan menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Dan nanti dihimpun juga segala macam kegiatan atau program yang dibutuhkan oleh masyarakat, nanti di Musnag kita bahas usulan-usulan itu sampai tercapai mufakat apa saja yang akan kita prioritaskan untuk dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas, dapat diketahui bahwa proses perencanaan pembangunan di Nagari Batu Bulek dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Tahapan awal dimulai dari masing-masing jorong, mengingat Nagari Batu Bulek terdiri dari sembilan jorong. Setiap jorong mengadakan rapat atau musyawarah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun usulan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Contohnya, ada jorong yang mengusulkan pembangunan aula serbaguna, sementara jorong lain mengusulkan pembangunan jalan usaha tani. Hasil rapat jorong tersebut kemudian dibuatkan berita acara dan diserahkan ke pihak nagari sebagai bahan untuk pembahasan lebih lanjut.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Menurut George R. Terry, pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan- kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Pengorganisasian di Nagari Batu Bulek erat kaitannya dengan mekanisme pengelolaan dana nagari (desa) yang dilaksanakan di Nagari tersebut, yang mana dana yang diterima oleh nagari sekitar 1,2 miliar rupiah. Anggaran tersebut sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang memberikan 1 miliar rupiah per desa atau nagari di Indonesia. Informasi mengenai anggaran yang diterima nagari Batu Bulek disampaikan oleh Bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek, berikut pernyataannya:

“Untuk dana anggaran nagari batu bulek diterima lebih kurang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat 1 miliar per desa atau nagari, jadi nagari batu bulek menerima anggaran nagari lebih kurang 1,2 miliar. Untuk penggunaan dana nagari sudah diatur regulasinya oleh pemerintah pusat, kementerian dalam negeri, kementerian desa, sampai ke Kabupaten.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas, pengorganisasian di Nagari Batu Bulek dalam mengelola dana nagari terlihat dilakukan secara terstruktur dan sesuai mekanisme yang telah diatur pemerintah. Wali Nagari Batu Bulek, Bapak Andi Musdar, menjelaskan bahwa anggaran yang diterima oleh nagari mencapai kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Jumlah tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 1 miliar rupiah untuk setiap desa atau nagari di Indonesia, ditambah penyesuaian tertentu sesuai kondisi di daerah. Beliau menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut sudah memiliki aturan jelas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, hingga pemerintah kabupaten, sehingga pengelolaannya tidak dilakukan secara sembarangan.

3. Penggerakan/Pelaksanaan (Actuating)

Menurut George R. Terry, penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.⁷² Dalam fungsi penggerakan (Actuating), pemerintah Nagari Batu Bulek berperan aktif untuk memimpin, membimbing, memotivasi, dan memastikan masyarakat memahami serta terlibat dalam setiap kegiatan pengelolaan dana nagari. Menurut George R. Terry, fungsi penggerakan (actuating) dalam manajemen mencakup motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Fungsi ini bertujuan untuk menggerakkan anggota organisasi agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek memberikan penjelasan bagaimana prosedur dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Nagari Batu Bulek, beliau menyatakan:

“Untuk kegiatan, nagari hanya bisa melakukan kegiatan yang merupakan kewenangan nagari, jadi nagari tidak bisa melakukan kegiatan yang di luar kewenangan nagari, contoh jalan

yang ada di nagari jalan utama, jalan yang menuju batusangkar seandainya itu ada kerusakan pak Wali tidak bisa menganggarkan dana untuk perbaikan jalannya, karena kewenangannya itu jalan Kabupaten, walaupun lokasinya di nagari batu bulek,tapi pak wali tidak boleh menganggarkan atau memperbaiki jalan tersebut yang dananya bersumber dari APB Nagari, tapi kalau jalan nagari, contohnya jalan masyarakat yang di kampung-kampung, dalam, yang memang itu kewenangan nagari, itu boleh, jadi memang tidak bisa sesuai keinginan wali nagari. Pak wali melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan nagari, tapi bukan berarti pak Wali melakukan kegiatan sewenang-wenang aja, itu kuncinya.

Secara keseluruhan, fungsi penggerakan di Nagari Batu Bulek dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai aturan, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi internal yang rutin, hingga pelayanan yang intensif dan berorientasi pada kepuasan warga. Dengan cara ini, semua elemen yang terlibat dapat termotivasi untuk bekerja sama secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

4. Pengendalian (Controlling)

Menurut George R. Terry, controlling dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan- perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Dalam fungsi manajemen pada aspek pengendalian (controlling), Bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek menjelaskan proses pelaksanaan controlling di Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kita ada namanya SiskeuDes (Sistem keuangan Desa) dan disitu ada namanya nagari, di nagari batu bulek, bukan hanya nagari batu bulek aja yang bisa kontrol, tapi bisa dikontrol oleh kecamatan, pemerintah daerah, kejaksaaan, sampai ke pusat itu bisa melihat progres keuangan di nagari. Jadi pengelolaan keuangan itu memang sehati-hati mungkin karena aturan yang mengikat kalau seandainya ada penyalahgunaan atau salah menggunakan, itu kita akan bermasalah, jangankan penyalahgunaan, salah menggunakan itu kita akan bermasalah, kalau disalahgunakan itu sudah disengaja sifatnya, tapi kalau salah menggunakan itu mungkin tujuannya baik tapi tidak sesuai dengan aturan, itu salah menggunakan, itu tujuannya memang untuk masyarakat juga, tetap salah. Dan untuk mencairkan dana di nagari itu kita harus melengkapi segala macam administrasi. Kalau tidak lengkap administrasinya, kita di nagari tidak akan menyetujui pencairan dananya. Kita harus melengkapi dulu SPJ nya baru kita bisa mencairkan dana dari nagari melalui KAUR Keuangan nanti. Jadi, itu mengenai pengelolaan keuangan di nagari.”

Sementara itu, Ibu Sonia Yulia Putri S. Kom, selaku Kaur Keuangan Nagari Batu Bulek, menambahkan penjelasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana nagari pada aspek pengawasan pengelolaan dana nagari di Nagari Batu Bulek. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Bu Sonia Yulia Putri S. Kom. tersebut, beliau mengatakan:

“Untuk sistem pengawasan, kita selalu menyampaikan kepada masyarakat, kita juga membuka peluang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk mengetahui kemana saja dana nagari atau dana desa yang diterima oleh nagari dan digunakan untuk apa saja, kita membuka peluang sebebas-bebasnya untuk masyarakat menanyakan kepada perangkat nagari tentang penggunaan dan pengelolaan dana nagari tersebut.”

Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa aspek pengawasan dan pengendalian dalam manajemen Nagari Batu Bulek sangat menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi melalui SiskeuDes, keterbukaan komunikasi dengan masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi kunci utama dalam menjaga tata kelola keuangan nagari agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah nagari untuk menjalankan fungsi pengendalian dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya pemerintahan nagari yang bersih dan efektif.

Kendala dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam melayani masyarakat di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sering kali menemui hambatan terkait dengan ketidakcukupan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur yang mendukung. Selain itu, masalah birokrasi yang panjang dan kurangnya

sinergi antar pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala yang umum dijumpai dalam proses implementasi kebijakan. Kemudian, berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti mengenai penelitian penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Nagari Batu Bulek yaitu menggunakan teori manajemen oleh George R. Terry di mana menurut Terry, terdapat 4 fungsi dasar manajemen yaitu Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan/Pelaksanaan (actuating), dan Pengawasan (controlling)⁸⁴, berikut peneliti bahas berdasarkan kendalanya yaitu:

1. Perencanaan (Planning)

Dalam proses manajemen, perencanaan (planning) merupakan fungsi awal yang sangat menentukan keberhasilan fungsi-fungsi manajemen selanjutnya. Namun, pada praktiknya, perencanaan seringkali menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas rencana yang disusun. Dalam konteks pemerintah Nagari Batu Bulek, kendala dalam perencanaan terungkap berdasarkan pernyataan Ibu Sonia Yulia Putri selaku Kaur Keuangan Nagari Batu Bulek sebagai berikut:

“Untuk kendala selama ini memang tidak ada kendala yang berarti, cuman dalam penyusunan perencanaan kendalanya tentu kekurangan dari anggaran yang ada atau yang tersedia di nagari batu bulek. Untuk kendala yang ditemui dalam pengelolaan keuangan, sejauh kita melaksanakan pengelolaan sesuai dengan regulasi yang ada itu tidak ada kendala yang ditemui.”

Terkait dengan kelemahan pemerintah nagari dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Nagari Batu Bulek, Bapak Al Ikhlas S. Kom selaku Kaur Perencanaan Nagari Batu Bulek mengungkapkan hal berikut:

“Kelemahan penyusunan perencanaan pembangunan masih adanya kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana itu yang disebabkan oleh memang anggaran yang tidak cukup tersedia di nagari, memang ada anggaran dana desa 1 miliar per desa, itu kita susah untuk mengaturnya dengan perencanaan pembangunan karena memang tidak mencukupi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.”

Hasil wawancara dengan Ibu Sonia Yulia Putri selaku Kaur Keuangan Nagari Batu Bulek menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Nagari Batu Bulek terletak pada keterbatasan anggaran yang tersedia. Meskipun secara umum pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan masalah berarti, keterbatasan alokasi dana menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (organizing) merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen menurut George R. Terry, yang berfungsi untuk membagi pekerjaan, menetapkan struktur, mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab, serta menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai. Meskipun pengorganisasian dirancang agar jalannya program atau kegiatan lebih tertib, efektif, dan efisien, pada praktiknya proses ini seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala dalam pengorganisasian (organizing) dalam Pemerintahan Nagari Batu Bulek dapat dilihat dari pernyataan Bapak Al Ikhlas S. Kom selaku Kaur Perencanaan Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan berikut:

“Sejauh ini untuk kendala dalam pengorganisasian tim itu belum ada kendala yang signifikan ya. Rata-rata kita sudah tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, pak Wali juga berpesan agar semua perangkat nagari agar dapat selalu berkoordinasi dengan baik, semua administrasi dan regulasi dilengkapi dan dipatuhi, misalnya kaur keuangan selalu berkoordinasi dengan kami selaku tim perencanaan dan tim pelaksana lapangan, begitu juga dengan kasi pelayanan, dan perangkat nagari lainnya diminta untuk saling berkoordinasi satu sama lain agar tidak ada kesalahan yang terjadi, atau diminimalisir lah kesalahannya.”

Pernyataan dari Bapak Al Ikhlas S. Kom., di atas diperkuat oleh Pernyataan dari Bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan:

“Untuk kendala dalam organisasi di nagari itu bisa dikatakan pasti ada ya, walaupun mereka sudah punya tanggung jawab dan tugas masing-masing di bidangnya. Kaur keuangan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan pelaporannya, kasi pelayanan bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan masyarakat, kaur perencanaan bertanggung jawab dalam perencanaan nagari hingga pelaksanaannya, begitu juga dengan perangkat-perangkat nagari lainnya. Dan saya juga selalu menyampaikan pada perangkat nagari untuk selalu berkoordinasi antar bidang, tujuannya ya itu, agar tidak ada masalah yang terjadi, tapi yang namanya dalam

bekerja bersama pasti ada masalah yang terjadi, misalnya selisih antara tim pelaksana dan kaur keuangan, intinya sih di komunikasi, makanya saya selalu menekankan pada mereka untuk selalu berkoordinasi dengan baik, agar tidak ada yang mis dalam komunikasi. Kendala-kendala yang berat sih nggak ada ya.”

Dalam hal kendala di pengelolaan keuangan, Ibu Sonia Yulia Putri, S. Kom selaku Kaur Keuangan di Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan berikut:

“Dalam pengelolaan keuangan, sejauh ini nggak ada kendala ya. Kita selalu berkomitmen untuk pengelolaan dana agar sesuai dengan RKP nagari. Jadi se bisa mungkin anggaran jangan sampai meleset. Kita juga ikut memantau kegiatan tim pelaksanaan lapangan, kita kontrol terus pelaksanaannya, biar nggak lari dari rencana, nanti kalau ada yang meleset, kita segera evaluasi, sama pak Wali juga. Karna pertanggungjawabannya susah.”

Sementara itu, dari aspek pelayanan publik, Bapak Akhyar, S. Ag selaku Kasi Pelayanan mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi lebih banyak terkait dengan masyarakat. Beberapa persyaratan administrasi kadang dirasa menyulitkan oleh warga, terutama bagi mereka yang berdomisili jauh dari kantor wali nagari, karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Namun, secara umum, ia menilai bahwa dalam melayani masyarakat, staf nagari tidak menghadapi kendala yang berarti, baik dalam hal kesiapan maupun pelaksanaan di kantor

3. Penggerakkan (Actuating)

Penggerakkan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada upaya menggerakkan dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi penggerakkan sering menghadapi berbagai kendala yang

dapat menghambat tercapainya kinerja optimal. Kendala dalam penggerakkan (actuating) dalam Pemerintahan Nagari Batu Bulek dapat dilihat dari pernyataan Bapak Al-Ikhlas S. Kom, selaku Kaur Perencanaan Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan:

“Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ya, kalau untuk itu mungkin belum ada ya, sejauh ini pelaksanaan kegiatan aman-aman aja, karna tim pelaksana itu kan orang-orang lama juga, jadi mereka sudah tau tugas masing-masing, paling kalau ketika kita ada rekrut anggota tim baru, perlu penyesuaian dulu, tapi bukan kendala juga, hanya butuh adaptasi saja.”⁹¹

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan:

“Seperti yang sudah saya bilang tadi Erika, saya selalu meminta semua perangkat nagari fokus pada tugasnya masing-masing, saling berkoordinasi antar bidang, kita adalah tim, bukan perseorangan, jadi kerja sama itu harus, kalau kerja sama tim sudah terbentuk, pelaksanaan kegiatan di lapangan akan lebih mudah dan tidak terkendala.”⁹²

Dari aspek pelayanan publik, Bapak Akhyar, S. Ag selaku Kasi Pelayanan mengatakan berikut:

“Kendala yang bapak hadapi dalam pelayanan publik adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah. Kayak kemarin kita buat seminar di aula serbaguna nagari, hanya sedikit yang datang. Padahal itu seminar yang cukup penting, soal narkoba. Tapi yang bapak lihat, memang kalau sama masyarakat ini kita harus pandai-pandai. Kita harus turun langsung ke lapangan. Jadi strateginya kita harus langsung terjun ke perkumpulan masyarakat, misalnya ke mesjid-mesjid, makanya sekarang ini kita lebih sering melakukan kunjungan-kunjungan ke jorong melalui acara-acara di mesjid, Pak Wali juga mengarahkan seperti itu.”⁹³

Dari sudut pandang masyarakat, pelayanan Pemerintah Nagari Batu Bulek dinilai sudah cukup baik. Masyarakat merasakan bahwa pegawai nagari bersedia melayani dengan ramah dan bahkan perangkat nagari sering turun langsung ke lapangan untuk menanggapi kebutuhan warga. Meski demikian, ada pengakuan bahwa terkadang proses pelayanan bisa sedikit lambat, namun hal tersebut dimaklumi karena banyaknya warga yang harus dilayani. Harapan yang muncul dari masyarakat adalah agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan sehingga segala urusan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini meliputi pengukuran kinerja, pemantauan pelaksanaan, serta pengambilan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan. Meskipun pengendalian merupakan bagian yang krusial dalam manajemen, proses ini sering menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Pemerintah Nagari Batu Bulek menunjukkan kinerja yang cukup

baik dengan minimnya kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan adanya prinsip keterbukaan yang dijalankan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memantau dan mengawasi penggunaan anggaran nagari secara transparan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan:

“Kalau dalam pengawasan, kendala sejauh ini tidak ada ya, karna seperti yang Bapak bilang tadi, yang kontrol itu banyak, mulai dari kecamatan, pemerintah daerah, kejaksaan, hingga ke pusat, termasuk masyarakat juga kita terbuka, jadi untuk pengawasan itu nggak ada kendala.”

Pernyataan dari Bapak Andi Musdar tersebut diperkuat oleh Ibu Sonia Yulia Putri selaku Kaur Keuangan di Nagari Batu Bulek, beliau mengatakan:

“Kita kan ada namanya SisKeuDes, jadi yang ngawasin banyak, untuk pengawasan itu belum ada kendala. Mulai dari masyarakat sampai ke pusat itu terbuka dan transparan”

Dari keterangan kedua narasumber tersebut, terlihat bahwa prinsip transparansi dan keterbukaan yang dijalankan secara konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam aspek pengawasan anggaran di Nagari Batu Bulek. Banyaknya pihak yang turut melakukan pengawasan, ditambah dengan dukungan teknologi melalui SisKeuDes, membuat proses controlling di nagari ini berjalan optimal dan belum pernah menemui hambatan yang berarti. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai oleh anggaran nagari benar-benar sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.

Upaya Pemerintah untuk mengatasi kendala dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam melayani masyarakat di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah Nagari Batu Bulek, seperti halnya pemerintah daerah lainnya, menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Namun, meskipun berbagai kendala muncul, pemerintah nagari berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi setiap hambatan yang ada. Melalui pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, pemerintah nagari berupaya mengatasi setiap kendala yang ada dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Ide-ide yang sudah dilaksanakan oleh nagari, kita sudah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selain di kantor wali nagari batu bulek, kita juga langsung turun ke masyarakat dalam bentuk beberapa kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang layanan-layanan di kantor wali nagari secara langsung dan berdiskusi dengan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan contohnya ada peremuan-pertemuan atau rapat koordinasi di setiap jorong dan juga ada kegiatan pertemuan dengan masyarakat di nagari satu kali sebulan dan dalam kegiatan tersebut kita menyampaikan apa- apa pelayanan, apa-apa kendala-kendala yang ada dan kita sampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak ada lagi yang tidak mengetahui tentang persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi dalam berurusan atau ada keperluan administrasi di kantor wali nagari batu bulek.”

Hasil wawancara tersebut menggambarkan salah satu bentuk inisiatif aktif pemerintah Nagari Batu Bulek dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pendekatan yang tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor nagari, tetapi juga secara proaktif turun langsung ke tengah masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah nagari dalam mendekatkan layanan kepada warga, sehingga akses informasi dan pelayanan administrasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari kantor nagari. Kemudian, berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti mengenai penelitian penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Nagari Batu Bulek yaitu menggunakan teori manajemen oleh George R. Terry di mana menurut Terry, terdapat 4 fungsi dasar manajemen yaitu Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan/Pelaksanaan (actuating), dan Pengawasan (controlling)⁹⁸, berikut peneliti bahas berdasarkan upaya pemerintah nagari Batu Bulek dalam menegatasi kendala yang ditemukan yaitu:

1. Perencanaan (Planning)

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Nagari Batu Bulek pada fungsi perencanaan pembangunan di nagari tersebut, narasumber mengungkapkan:

“Selama kita melaksanakan perencanaan dari awal dengan baik, jadi seluruh kendala yang

ada yang mungkin kita hadapi, jadi ya kia melibatkan seluruh lapisan masyarakat kembali, untuk mencari solusinya, jadi seandainya ada kendala kita akan duduk kembali bersama masyarakat mencari solusi sehingga kendala tersebut bisa kita atasi.”

Selanjutnya, upaya pemerintah Nagari Batu Bulek untuk mengatasi kendala dari aspek pengelolaan keuangan, narasumber mengungkapkan:

“Dalam hal pengelolaan keuangan di nagari batu bulek, kalau seandainya ada kendala kita akan selalu berkoordinasi dengan instansi atau dinas terkait hingga kendala yang kita temui bisa diatasi, kita dalam pengelolaan keuangan selalu berpegang pada regulasi yang ada dan akan selalu meminta petunjuk kepada dinas atau instansi terkait dalam pengelolaan keuangan di nagari batu bulek.”

Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah Nagari Batu Bulek untuk mengatasi kelemahan pemerintah nagari dalam penyusunan perencanaan pembangunan di nagari, narasumber mengungkapkan:

“Jadi, mengatasi kelemahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kita memang selalu mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh, yang pertama seluruh kepala jorong, kemudian melibatkan seluruh unsur lembaga yang ada di nagari, sehingga tidak ada kendala yang tidak bisa kita atasi di nagari batu bulek.”

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut mencerminkan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip fungsi perencanaan dalam manajemen, yaitu perencanaan yang partisipatif, berbasis regulasi, dan terkoordinasi dengan baik. Pendekatan ini memungkinkan Nagari Batu Bulek untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai kendala secara efektif sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (organizing) merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen menurut George R. Terry, yang berfungsi untuk membagi pekerjaan, menetapkan struktur, mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab, serta menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai. Upaya mengatasi kendala pengorganisasian oleh Pemerintah Nagari Batu Bulek tercermin dari kutipan wawancara bersama narasumber berikut:

“Jadi, dalam pelayanan publik, kendala yang ada kita atasi secara bersama itu bagaimana masyarakat dapat terlayani dengan baik di kantor wali nagari batu bulek, kita akan memaksimalkan pelayanan di kantor wali nagari batu bulek sebelumnya kita mempunyai staf satu orang dan alhamdulillah kita sudah menambah staf menjadi dua orang sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi dan tidak ada kendala dalam hal pelayanan. Kegiatan turun ke lapangan juga selalu kita gerakkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Nagari.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Batu Bulek menyadari pentingnya penataan dan penguatan struktur organisasi dalam mendukung kelancaran pelayanan publik. Salah satu kendala utama yang dihadapi pada aspek pengorganisasian adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah staf yang bertugas di kantor wali nagari. Dengan hanya memiliki satu staf sebelumnya, kapasitas pelayanan menjadi terbatas sehingga berpotensi menimbulkan antrian, keterlambatan, atau pelayanan yang kurang optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah nagari mengambil langkah penambahan personel, dari satu orang staf menjadi dua orang. Penambahan ini merupakan bentuk penyesuaian struktur organisasi yang sangat relevan dalam konteks asas departmentation and assign the personnel dalam fungsi pengorganisasian menurut teori manajemen George R. Terry.

Dengan bertambahnya staf, beban kerja dapat dibagi secara lebih merata, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, lebih responsif, dan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, perangkat nagari terus berupaya untuk turun langsung ke masyarakat untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat nagari jika hanya berfokus pada pelayanan di kantor saja.

3. Penggerakkan (Actuating)

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen, penggerakkan (actuating) memiliki peranan penting untuk memastikan seluruh rencana dan kebijakan organisasi dapat diimplementasikan secara efektif. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah nagari Batu Bulek dalam mengatasi kendala dalam penggerakkan (actuating) dapat dilihat dari pernyataan narasumber, sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan pembangunan tidak ada yang mudah dilaksanakan, itu ada beberapa kekurangan-kekurangan yang kita miliki, tapi alhamdulillah dengan kerja sama

dengan seluruh unsur yang ada di nagari kita berusaha bagaimana kekurangan itu dapat kita lengkapi secara bersama-sama.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Batu Bulek memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan tersebut juga menegaskan adanya kesadaran pemerintah nagari terhadap tantangan dan kekurangan yang muncul dalam proses pelaksanaan pembangunan, yang secara langsung berkaitan dengan fungsi penggerakan (actuating). Upaya yang dilakukan pemerintah nagari untuk mengatasi kekurangan dan kendala pada tahap penggerakan ini tercermin melalui praktik kerja sama lintas unsur, yang melibatkan seluruh elemen di nagari, baik perangkat pemerintahan, lembaga-lembaga lokal, maupun masyarakat. Selain itu, bentuk koordinasi dan diskusi bersama menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan komunikasi, yang sering muncul sebagai kendala dalam penggerakan. Dengan duduk bersama seluruh unsur nagari, pemerintah dapat mendengar langsung masukan, berbagi informasi secara terbuka, serta membangun komitmen kolektif untuk saling melengkapi kekurangan yang ada. Dengan demikian, hasil wawancara ini menegaskan bahwa upaya pemerintah Nagari Batu Bulek dalam mengatasi kendala pada fungsi penggerakan (actuating) dilakukan melalui pemberdayaan kerja sama, kepemimpinan yang inklusif, serta komunikasi yang terbuka, sehingga setiap hambatan dapat diatasi secara bersama-sama demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Pengawasan (Controlling)

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen, pengawasan (controlling) berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengawasan sering menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya mekanisme evaluasi, kurangnya keterbukaan informasi, atau keterbatasan partisipasi pengawasan dari pihak terkait. Namun, kondisi berbeda dengan pemerintah Nagari Batu Bulek, di mana kendala pengawasan tergolong minim di nagari tersebut karena pemerintah Nagari Batu Bulek telah menerapkan pemerintahan yang transparan dan terbuka sebebas-bebasnya pada masyarakat sesuai dengan kutipan wawancara bersama narasumber berikut:

“Untuk sistem pengawasan, kita selalu menyampaikan kepada masyarakat, kita juga membuka peluang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk mengetahui kemana saja dana nagari atau dana desa yang diterima oleh nagari dan digunakan untuk apa saja, kita membuka peluang sebebas-bebasnya untuk masyarakat menanyakan kepada perangkat nagari tentang penggunaan dan pengelolaan dana nagari tersebut.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Batu Bulek menerapkan pengawasan (controlling) secara terbuka dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui dan menanyakan penggunaan dana nagari. Pendekatan ini mencerminkan komitmen transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh perangkat nagari, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung sebagai bentuk kontrol sosial demi mencegah penyalahgunaan anggaran.

SIMPULAN

1. Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Nagari Batu Bulek berdasarkan empat fungsi manajemen menurut George R. Terry menunjukkan proses yang partisipatif, transparan, dan sesuai regulasi. Pada fungsi perencanaan, kebutuhan dan prioritas pembangunan disusun melalui Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) dengan melibatkan pemerintah nagari, Bamus, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga lainnya, meskipun realisasinya sering terkendala keterbatasan anggaran. Fungsi pengorganisasian berjalan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pembagian tugas yang jelas sesuai Peraturan Nagari dan peraturan perundang-undangan, memastikan penempatan personel dan pengelolaan dana sesuai ketentuan. Dalam fungsi penggerakan, pemerintah nagari memimpin pelaksanaan program dengan pendekatan kolaboratif, membangun komunikasi terbuka, melibatkan masyarakat, serta bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan, diiringi transparansi penggunaan dana melalui media publikasi dan papan informasi. Pada fungsi pengendalian, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh wali nagari, Bamus, dan pihak eksternal, serta melibatkan masyarakat melalui laporan kegiatan, serah terima hasil, dan penggunaan aplikasi SisKeuDes,

- meskipun mekanisme evaluasi formal dan tindak lanjut perbaikan belum sepenuhnya optimal.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Batu Bulek dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan meliputi beberapa aspek. Pada fungsi perencanaan, kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat direalisasikan secara penuh meskipun pengelolaan keuangan sudah sesuai regulasi. Pada fungsi pengorganisasian, meskipun pembagian tugas dan koordinasi antar perangkat berjalan baik, kendala kecil berupa komunikasi dan penyesuaian tetap terjadi, terutama saat interaksi antar tim. Dalam fungsi penggerakan (actuating), kendala yang muncul adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, sehingga pemerintah nagari harus melakukan pendekatan langsung ke lapangan untuk meningkatkan keterlibatan warga. Sedangkan pada fungsi pengawasan (controlling), kendala hampir tidak ditemukan karena penerapan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan sistem SisKeuDes membuat pengawasan berjalan efektif dan melibatkan berbagai pihak. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi berkisar pada keterbatasan anggaran, komunikasi antar perangkat, dan partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan, sementara aspek pengawasan berjalan lancar.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Batu Bulek dalam mengatasi kendala pada fungsi manajemen adalah pendekatan yang strategis, partisipatif, dan adaptif. Pada fungsi perencanaan, pemerintah melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta rutin melakukan rapat koordinasi dengan kepala jorong dan lembaga terkait untuk mencari solusi bersama serta memastikan perencanaan berjalan sesuai kebutuhan. Dalam fungsi pengorganisasian, penambahan staf dari satu menjadi dua orang di kantor wali nagari membantu memperkuat struktur pelayanan sehingga pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif dan responsif. Pada fungsi penggerakan (actuating), pemerintah nagari mengedepankan kerja sama lintas unsur dan komunikasi terbuka agar kendala pelaksanaan dapat diatasi bersama secara efektif dan pembangunan berjalan lancar. Sementara pada fungsi pengawasan (controlling), prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dengan membuka akses pengawasan secara luas kepada masyarakat serta instansi terkait, didukung mekanisme pelaporan dan serah terima kegiatan secara terbuka, sehingga potensi kendala dalam pengawasan dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, keempat fungsi manajemen ini saling mendukung dan memperkuat tata kelola pemerintahan Nagari Batu Bulek agar tetap berjalan baik, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Tessar Permata, Linda Setiawati, dan Lutfi Khoerunnisa, “Analisis Penerapan Fungsi Manajemen George Robert Terry di Perpustakaan Pitimoss”, *Journal of Librarianship and Information Science*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, hal. 92.
- Amini, dkk, “Implementasi Perencanaan (Planning) Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus SDIT Ma’had Muhammad Saman Sunggal)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal. 1547.
- Andria Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa”, *Meraja Jurnal*, Vol.2, No. 2, Juni 2019, hal. 138.
- Anggit Sulistiawan, Budi Ispriyarno, dan Aprista Ristyawati, “Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 149.
- Arsan Latif, dkk, “Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah” (Jakarta: Asian Development Bank, 2019), hal. 19.
- Candra Wijaya dan Muhammad Rifa’I, “Dasar-dasar Manajemen” (Medan: Perdana Publishing, 2016), hal. 14.
- Desriadi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2, No. 1, hal. 65.
- Dian Pratiwi Haeruddin, dkk, “Andi Mudzakkar dalam Membangun Kabupaten Luwu (2009- 2019)”, *Jurnal Phinisi integration Review*, Vol. 4, No. 3, Oktober 2021, hal. 465.
- Epi Puspita D., “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Indu Makombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu*

- Komunikasi, Vol. 4, No. 2, November 2019, hal. 166.
- George R. Terry, dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara), Februari 2019, hal. 8-9.
- Hindun, “PERENCANAAN STRATEGIS DAN PRILAKU MANAJERIAL LEMBAGA- LEMBAGA PENDIDIKAN”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 1, No. 1, hal. 113-114.
- Husaini dan Happy Fitria, “Manajemen Kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Vol. 4(1), Januari-Juni 2019. Hal. 45.
- Idil Akbar, “Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung”, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 5, No. 2, September 2018, hal. 102
- Jauhariah dan Martinus Syamsudin, “Perencanaan Pembangunan”, FOKUS, Vol.21, No. 1, Maret 2023. Hal. 215.
- Kementerian Keuangan, “Postur APBD Kab. Tanah Datar”, 15 Desember, 2024, diakses pada
- Muhammad Hekam, dkk, “Pemberdayaan Pengrajin Daun Pandandi Desa Gunungteguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik”, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Vol. 15, No. 1, 2021, hal. 136.
- Muhammad Nasir, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023”, Journal of Geopolitics and Public Policy, Vol. 1, Issue 2, November 2023, hal. 24.
- Nizamuddin Silmi, Bambang Kurniawan, dan Muhammad Subhan, “PERENCANAAN DALAM ILMU PENGANTAR MANAJEMEN”, Journal of Students Research, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hal. 110.
- Priyono, “Pengantar Manajemen” (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2007), hal.6.
- Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry”, Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU), Vol. 1(3), Agustus 2023. Hal. 53.
- Stefly, N. D. Mulalinda, Ismail Sumampow, dan Alfon Kimbal, “Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro”, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 3.
- Syamsul Rijal dan Thamrin Tahir, “Analisis Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar)”, Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, hal. 263.
- Tumija, Ahmad Zakky Ramadhan, “Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), Vol.10, No. 2, Desember 2023, hal. 148.
- Wawancara dengan Bapak Akhyar, S. Ag selaku Kasi Pelayanan Nagari Batu Bulek, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Al Ikhlas S. Kom, selaku Kaur Perencanaan Nagari Batu Bulek, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Andi Musdar selaku Wali Nagari Batu Bulek, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Sonia Yulia Putri, S. Kom selaku Kaur Keuangan Nagari Batu Bulek, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.
- Yusuf, dkk, “Teori Manajemen” (Solok: Cendikia Muslim, 2023), hal. 21.